



# Gorontalo Development Review

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gdrev>

Vol 08, No 01, Tahun 2024

P-ISSN : 2614-5170, E- ISSN :2615-1375

Nationally Accredited Journal, Decree No.225/E/KPT/2022

## Strategi Pembangunan Syariah dalam Perekonomian Berkelanjutan di Surabaya

*Sharia Development Strategy in a Sustainable Economy in Surabaya*

Ainun Nafisatur Rohmah<sup>1</sup>, Muhammad Haykal Safier<sup>2</sup>, Syariatul Hasanah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email<sup>1,2,3</sup> : [ainunnafisha282@gmail.com](mailto:ainunnafisha282@gmail.com); [haykalsafier@gmail.com](mailto:haykalsafier@gmail.com);  
[syariatulhasanah2004@gmail.com](mailto:syariatulhasanah2004@gmail.com)

---

### Article info

#### Article history:

Received; 27-02-2024

Revised; 12-11-2024

Accepted; 01-04-2025

---

**Abstract.** Surabaya has a strategic role for the national priority scale in a sustainable economy, especially in East Java. This research aims to provide an in-depth understanding of sharia development strategies that can overcome various economic challenges faced by the city of Surabaya. Thus, through the analysis of sharia development strategies in the context of the economy in Surabaya, it is hoped that this research can provide new insights for readers and the public in advancing a sustainable economy in this city. The method used in this research is qualitative research, with a library research approach that uses books and other literature as the main material for information about the object of research and theories relevant to the problem in the research.

**Abstrak.** Surabaya berperan strategis bagi skala prioritas nasional pada perekonomian berkelanjutan di daerah Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi pembangunan syariah yang diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi kota Surabaya. Dengan demikian, analisis strategi pembangunan syariah dalam konteks perekonomian di Surabaya yang dilakukan pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca dan masyarakat dalam memajukan perekonomian yang berkelanjutan di kota Surabaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka (library research) yang menggunakan literatur buku, jurnal, dan sumber lainnya sebagai bahan utama informasi mengenai objek penelitian dan teori yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian.

---

#### Keywords:

ShariaDevelopment  
Strategy;  
Sustainable  
Economy;

---

#### Correspondens author:

Email: [ainunnafisha282@gmail.com](mailto:ainunnafisha282@gmail.com)

## **Pendahuluan**

Kota Surabaya yang merupakan Ibu kota provinsi Jawa timur, mempunyai peran yang sangat strategis bagi standar nasional yaitu sebagai pusat pelayanan kegiatan di Jawa bagian timur. Kota Surabaya sangat berpeluang untuk berperan dalam peningkatan ekonomi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang disebabkan karena kota ini dalam standar regional merupakan kota perdagangan dan jasa yang merupakan salah satu pusat transportasi nasional dan internasional, baik melalui jalur darat, udara, maupun laut (RPJMD Kota Surabaya, 2021).

Menurut KLH, perekonomian berkelanjutan yang terdiri dari konsumsi, distribusi, dan produksi harus mempunyai dampak yang positif bagi lingkungan sekitar (tidak menyebabkan polusi), kegiatan yang dilakukan harus besar manfaatnya untuk menciptakan kesejahteraan dari generasi ke generasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang secukupnya tanpa ada pemborosan. (Zakaria & Rachmat, 2021). Brundtland Report dari PBB mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mempunyai prinsip mencukupi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa depan (Rintan P. Ayu Aprilliani, 2018).

Pendekatan industrialisasi kapitalis yang dominan selama ini cenderung mengutamakan investasi modal tanpa memperhatikan kepentingan luas masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi tidak selaras dengan potensi dan keterampilan masyarakat yang berbeda dengan pembangunan ekonomi berbasis syariah (Beik & Arsyianty, 2017).

Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi pustaka sebagai pendekatan utamanya, dengan menggunakan berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai strategi pembangunan syariah yang dapat dipakai untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi kota Surabaya. Dengan demikian, melalui analisis strategi pembangunan syariah dalam konteks perekonomian di Surabaya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan baru bagi pembaca dan masyarakat dalam memajukan perekonomian yang berkelanjutan di kota ini (Purwana, 2013).

Konsep pembangunan ekonomi dalam Islam mencakup secara menyeluruh dan terpadu pembangunan dalam aspek moral, spiritual, dan materi. Pembangunan diarahkan oleh tujuan dan nilai-nilai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam semua dimensi kehidupan (Joni, 2008). Pembangunan ekonomi dalam pandangan Islam memiliki dimensi material dan spiritual yang meliputi tidak hanya kemajuan ekonomi, tetapi juga pertumbuhan individu, perkembangan sosial, budaya, dan aspek lainnya (Joni, 2008).

Ekonomi Islam dipandang sebagai suatu disiplin ilmu yang membantu mengatur alokasi dan distribusi sumber daya langka secara sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tanpa membatasi individu atau mengakibatkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Chapra menyatakan bahwa Ekonomi Islam membantu mewujudkan kesejahteraan manusia dengan mengikuti ajaran Islam. Di sisi lain, Mannan mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai studi sosial yang memeriksa masalah-masalah ekonomi masyarakat yang terinspirasi oleh prinsip-prinsip Islam (Fuadi, 2018).

Strategi diartikan rencana tindakan yang menjabarkan alokasi sumber daya dan aktivitas-aktivitas untuk beradaptasi dengan lingkungan, membantu mencapai tujuan atau sasaran. Sementara itu jika mengacu kepada pengertian secara legal berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi (Jajang et al., 2021).

Ada empat elemen penting strategi pembangunan yang perlu diperhatikan dalam membentuk sebuah strategi pembangunan yakni (Jajang et al., 2021):

a. Mekanisme Penyaringan (*Filtering Mechanism*)

Mekanisme penyaringan memungkinkan masyarakat untuk memilih penggunaan sumber daya yang terbatas secara bijak sehingga penggunaan secara keseluruhan tidak melebihi jumlah yang tersedia, dan tujuan sosio-ekonomi dari sistem pembangunan juga dapat tercapai.

b. Mekanisme yang Memotivasi (*Motivating Mechanism*)

Mekanisme yang memotivasi berfungsi mengarahkan masyarakat untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan perintah *filtering mechanism*, terlepas dari apakah hal tersebut sesuai dengan kepentingan mereka sendiri atau kepentingan masyarakat.

c. Restrukturisasi Sosio-ekonomi (*Socio-Economic Restructuring*)

Restrukturisasi sosio-ekonomi berperan dalam membantu proses pendistribusian sumber daya yang langka dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya sampai efisiensi (*efficiency*) dan pemerataan (*equity*) yang optimal terwujud.

d. *Role of the State*

Proses restrukturisasi yang disebutkan di poin sebelumnya tidak akan dapat berlangsung secara optimal tanpa keterlibatan semua pihak, termasuk di dalamnya adalah pemerintah. Pemerintah juga harus memainkan peran yang positif dan berorientasi pada tujuan perekonomian dan pembangunan yang telah ditetapkan secara bersama.

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada saat ini tanpa menghilangkan kemampuan bertahan hidup dari generasi masa depan. Artinya, bagaimana cara kita membangun perekonomian kita tanpa merusak lingkungan atau sumber daya alam yang kita butuhkan untuk hidup dengan menggunakan sumber daya kita dengan bijak sehingga anak cucu kita juga bisa menggunakan untuk kehidupan mereka nanti. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan strategi pelaksanaannya, yaitu pemerataan, partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif dalam jangka panjang yang diikuti dengan pendekatan secara ideal.

Pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial serta lingkungan yang terintegrasi. Daya tampung lingkungan yang tidak boleh melebihi batasan, karena dapat membuat struktur dan fungsi dasar ekosistem yang digunakan sebagai penunjang kehidupan akan mengalami kerusakan (Masruroh, Nikmatul, 2022). Lingkungan dan sosial dalam teori ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan. Prinsip-prinsip yang berasal dari ajaran Islam membentuk kerangka kerja komprehensif untuk mengatasi tantangan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, ekonomi Islam menyediakan landasan bagi model pembangunan yang tidak hanya berkelanjutan secara ekonomi tetapi juga moral dan adil (Mansur, 2011).

Sebagai konsep sederhana namun mencakup dimensi yang cukup luas, pencarian konsep keberlanjutan yang memenuhi harapan semua pihak akan terus berjalan. Pengembangan konsep dan model-model yang telah ada diharapkan akan selalu muncul. Dengan memperhatikan fenomena yang ada maka perubahan paradigma keberlanjutan hendaknya mempertimbangkan aspek berikut (Jaya, 2004):

- 1) Perilaku generasi kini tidak dapat sepenuhnya menentukan perilaku generasi mendatang.

- 2) Generasi mendatang harus dipastikan memperoleh paling tidak tingkat konsumsi minimum.
- 3) Pergerakan harga sumberdaya alam dan hak kepemilikan terhadap konsumsi dimasa mendatang harus ditentukan untuk menghindari eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam masa kini.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) yang menggunakan buku dan literatur lainnya sebagai bahan utama informasi mengenai objek penelitian dan teori yang relevan dengan permasalahan di penelitian. Pada bagian ini dilakukan pengkajian dan identifikasi mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari buku dan artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah (Adlini et al., 2022).

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan mendapatkan pemahaman mengenai kenyataan berdasarkan proses berfikir induktif. Dalam penelitian kualitatif peneliti melaksanakan kegiatan penelitian secara objektif terhadap kenyataan subjektif yang diteliti. Dalam hal ini subjektifitas berlaku terhadap kenyataan yang diteliti, dalam arti kenyataan tersebut dilihat dari sudut mereka yang diteliti (Adlini et al., 2022).

RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 memperhatikan, dan selaras dengan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 karena pembangunan daerah adalah bagian pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional akan tercapai jika didukung oleh pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional (Bappeda, 2019).

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Permasalahan Pembangunan di Surabaya**

Mengidentifikasi permasalahan pembangunan di Kota Surabaya selalu dilakukan oleh pihak pemerintah kota diseluruh bidang yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dikarenakan Kota Surabaya adalah kota metropolitan yang memiliki potensi permasalahan dan tantangan pembangunan yang kompleks. Selain itu juga, adanya analisis terhadap permasalahan yang ada di Kota Surabaya dikarenakan Surabaya merupakan kota perdagangan, industri dan jasa, yang pastinya akan berdampak lebih berat jika dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Timur dan bertumpu pada sektor primer.

Berdasarkan analisis mengenai gambaran umum permasalahan pembangunan di Kota Surabaya yang dipaparkan oleh RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2020 dilanjutkan dengan analisis permasalahan pembangunan jangka menengah yang perlu diperhatikan pada tahun 2021-2026, dijelaskan bahwa masih diperlukan adanya penanganan dan pemulihan dampak ekonomi dan sosial akibat bencana nasional pandemi Covid-19; pemenuhan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja bagi angkatan kerja yang belum optimal; kunjungan dan pengembangan obyek destinasi wisata dan kerjasama pelaku pariwisata yang belum optimal; Masih diperlukannya optimalisasi pendataan, pengembangan dan inovasi berkelanjutan di bidang pelayanan publik dan investasi serta beberapa permasalahan pembangunan lainnya (RPJMD Kota Surabaya, 2021).

Dari permasalahan umum tersebut, berikut beberapa penjabaran mengenai permasalahan yang dihadapi dan perlu ditangani oleh Pemerintah Kota Surabaya:

1. Permasalahan di bidang tenaga kerja:
  - a. Adanya pemutusan hubungan kerja sebagai dampak dari pandemi covid-19;
  - b. Fasilitas pembentukan wirausaha baru masih diperlukan untuk memperluas kesempatan kerja;

- c. Kurangnya Keseimbangan informasi kesempatan kerja dari pengusaha dan penyediaan tenaga kerja sesuai yang dibutuhkan;
  - d. Kurangnya *soft skill* tenaga kerja lokal Surabaya dalam dunia kerja;
  - e. Masih adanya peserta pelatihan berbasis kompetensi yang belum mendapatkan fasilitasi penyaluran kerja;
  - f. Pengawasan ketenagakerjaan, perlindungan serta hubungan industrial belum optimal dijalankan (belum semua kasus ketenagakerjaan dapat ditindaklanjuti dengan perjanjian bersama).
2. Permasalahan di bidang lingkungan hidup:
    - a. Masih diperlukan upaya untuk mengoptimalkan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau, sebagai salah satu upaya terhadapantisipasi dan mitigasi perubahan iklim mikro;
    - b. Masih terbatasnya fasilitas pengelolaan sampah yang menerapkan Teknologi 3R;
    - c. Masih diperlukan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hijau;
    - d. Masih adanya kegiatan/usaha diawasi yang belum menaati/mematuhi aspek lingkungan;
    - e. Masih adanya permasalahan lingkungan hidup yang perlu ditangani;
    - f. Menurunnya kualitas air bersih di Kota Surabaya antara lain disebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan air baku.
  3. Permasalahan dan tantangan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah:
    - a. Masih belum optimalnya pemanfaatan fasilitasi akses permodalan untuk usaha mikro;
    - b. Masih ada produk usaha mikro yang belum layak diuji mutunya dan belum memiliki sertifikasi merk, halal dan BPPOM;
    - c. Masih ada koperasi masih belum berklasifikasi AAB dan kurang optimalnya pertumbuhan anggota koperasi serta peningkatan volume usaha koperasi;
    - d. Kurangnya jiwa *entrepreneurship* maupun pengetahuan manajemen usaha yang dimiliki pelaku UMKM, sehingga jenis usaha yang ditekuni seringkali tidak bertahan lama.
  4. Permasalahan dan tantangan di bidang pariwisata:
    - a. Menurunnya jumlah kunjungan di objek wisata dikarenakan pandemi Covid-19;
    - b. Masih belum optimalnya pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata;
    - c. Masih belum optimalnya kerjasama dengan *stakeholder* bidang pariwisata.
  5. Permasalahan dan tantangan di bidang perdagangan:
    - a. Masih adanya usaha mikro yang belum dapat meningkatkan aksesibilitas pemasaran produknya;
    - b. Masih adanya sentra dan pasar yang belum beroperasi secara optimal
    - c. Kurang optimalnya pengelolaan pasar tradisional terutama yang dikelola oleh PD Pasar.
  6. Permasalahan dan tantangan di bidang keuangan:
    - a. Belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan;
    - b. Belum optimalnya pendapatan dari Dana-Dana Perimbangan dikarenakan keterlambatan dan petunjuk teknis yang senantiasa berubah;
    - c. Kurang optimalnya realisasi pendapatan daerah karena dampak Covid-19;
    - d. Masih adanya aset tanah yang belum dilakukan sertifikasi serta pemasangan pagar, papan, patok karena masih belum jelas batas dan belum lengkap bukti kepemilikannya.

## **Strategi Pembangunan di Surabaya**

Strategi merupakan serangkaian upaya mengenai gambaran proses pencapaian sasaran strategis dalam pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan yang penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused-management*). Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat pemerintah daerah dalam berupaya menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan daerah agar dapat meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan daerah.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang telah dijabarkan di atas maka Pemerintah Kota Surabaya dapat merumuskan strategi pembangunan kedepan sebagai berikut:

Strategi 1: Penguatan daya saing untuk mendukung kota surabaya sebagai pusat perdagangan nasional dan dunia.

Sebagai upaya untuk memanfaatkan beragam peluang yang dimiliki Kota Surabaya, maka perlu dilakukan pengelolaan dan pemanfaatan semaksimal mungkin seluruh kekuatan yang dimiliki Kota Surabaya. Sebagai salah satu ibu kota provinsi yang mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia, Kota Surabaya mempunyai berbagai kekuatan yang menunjang kegiatan perekonomian, baik itu kegiatan niaga, perdagangan antar pulau, maupun perdagangan antar negara. Melihat tren laju pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya berdasarkan laju pertumbuhan ekonomi menurut industri menunjukkan pergerakan yang beragam. Pertumbuhan perekonomian di Kota Surabaya terjadi hampir pada seluruh sektor usaha kecuali sektor usaha pengadaan listrik dan gas.

Jika dicermati, industri dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi setiap tahunnya adalah industri keuangan/asuransi, industri informasi/komunikasi, industri penginapan/restoran, dan industri grosir/eceran reparasi mobil/sepeda motor. Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan bahwa Surabaya mampu mencapai pembangunan yang baik dalam segala bidang yang perlu dikelola untuk menunjang daya saing pembangunan.

Upaya menunjang kegiatan perdagangan melalui partisipasi di pasar tradisional akan meningkatkan kinerja pasar tradisional melalui pengaktifan pasar yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar dan meningkatkan kesejahteraan pedagang melalui peningkatan penjualan. Peningkatan akses transaksi penjualan yang mudah dan nyaman membeli. Pelaksanaannya meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas kondisi fisik bangunan, lokasi outlet penjualan, jalur penghubung stand, tempat parkir, dan lain-lain. Operasi pasar juga akan dirangsang melalui pengaturan yang jelas pada beberapa aspek, antara lain: Pengaturan lokasi pedagang, fasilitas yang ada di pasar, standar operasional prosedur pengelolaan pasar dan pelayanan pasar, dan lain-lain melibatkan unsur kelurahan, kelurahan, LPMK, RW dan RT dalam pengelolaan dan pengambilan kebijakan.

Strategi 2: Pengembangan infrastruktur hijau dan sistem transportasi perkotaan terpadu.

Sistem pemerintah dalam mengembangkan perencanaan kota melalui penyediaan infrastruktur ramah lingkungan dan transportasi perkotaan yang terintegrasi menciptakan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat, karena dalam penciptaannya tidak bergantung pada koneksi infrastruktur ekonomi dan sosial yang tersedia. Inklusi ekonomi dapat dipisahkan karena infrastruktur ini menjembatani akses terhadap aliran distribusi dari perekonomian yang ada. Pemkot Surabaya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kereta Api Indonesia dan Pelindo III tentang arah kebijakan angkutan massal nasional dan daerah, Bapeprof dan jasa angkutan daerah.

Oleh karena itu, kondisi infrastruktur dan transportasi yang baik harus diiringi dengan terciptanya kondisi lingkungan yang asri dan nyaman. Infrastruktur dan kondisi lingkungan yang indah dan nyaman tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan faktor yang menarik untuk menarik investasi di bidang ekonomi yang menjadi pusat pembangunan daerah.

Strategi 3: Pemerataan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, bermartabat dan mandiri.

Di era globalisasi dan kemakmuran, modal sosial dan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan daerah. Penting untuk mengubah modal sosial berskala besar menjadi aset yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Perlu dilakukan tindakan yang cermat dan bijaksana dalam pemberian dan penyiapan modal sosial agar menjadi aset pembangunan daerah yang benar-benar produktif, bermanfaat, dan berkualitas yang mendukung proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada di daerah.

Modal sosial dan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari sistem sosial dan memiliki potensi besar bagi pembangunan masyarakat berkelanjutan. Semakin tinggi kualitas modal sosial dan sumber daya manusia suatu daerah, maka daerah tersebut akan semakin maju. Sebaliknya, semakin memburuknya kualitas modal sosial dan sumber daya manusia suatu daerah, maka semakin besar dampaknya terhadap kemunduran pembangunan daerah. Untuk itu, Pemkot Surabaya menyusun strategi peningkatan dan pengalokasian sumber daya manusia (SDM) yang kompetitif dan bermartabat. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan akses terhadap pendidikan dasar, layanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Strategi 4: Mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang berdampak pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran.

Terciptanya inklusivitas ekonomi karena situasi perekonomian yang terjadi di Kota Surabaya tidak hanya disebabkan oleh perubahan situasi makro ekonomi, namun juga didasarkan pada kinerja perekonomian kota madya sebagai sektor riil, khususnya kinerja perekonomian di sektor mikro dan peningkatan mikro yang tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dibangun perusahaan-perusahaan akan menjadi pilar untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran yang ada.

Mengingat pemerintah pusat mendorong penguatan UMKM sebagai mayoritas masyarakat dan fokus pada pengembangan ekonomi kerakyatan, maka penguatan UMKM menjadi landasan terpenting dalam memajukan perekonomian Kota Surabaya. Masyarakat yang tinggal baik di Kota Surabaya maupun di tingkat nasional beroperasi dalam konteks usaha mikro, kecil dan menengah. Pendanaan untuk membantu usaha kecil dan menengah lebih fokus pada peningkatan kapasitas dan kualitas produksi. Perlunya integrasi sektor UMKM melalui penciptaan wirausaha baru, peningkatan keterampilan masyarakat, standardisasi, pengembangan pemasaran produk dan peningkatan akses permodalan.

Berbagai jenis intervensi akan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, khususnya dalam upaya pemulihan dampak pandemi COVID-19, antara lain: Peningkatan kualitas produk dan pembinaan manajemen bisnis dan keuangan, dukungan bisnis dan pengembangan produk, fasilitasi sertifikasi produk (Halal, merek, BPOM, PIRT, dll), fasilitasi pemasaran produk baik offline maupun online, sarana dan prasarana usaha. Penyediaan produk, kurasi produk yang dihasilkan secara rutin dan kerjasama dengan pihak ketiga/perusahaan/lembaga (memberikan pelatihan, memfasilitasi pemasaran, menyediakan infrastruktur usaha bagi usaha mikro). Berbagai kegiatan yang dilakukan sebagaimana tersebut di atas diharapkan mampu bersaing dengan produk industri dan pada akhirnya

meningkatkan pendapatan usaha mikro bahkan mencapai standar nasional dan internasional.

Pemerintah Kota Metropolitan Surabaya mewujudkan hal ini dengan melakukan intervensi pemasaran lokal, nasional dan internasional melalui program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Di sektor pariwisata, pariwisata aksesibel dan wisata tematik, termasuk wisata halal, akan diintegrasikan. Pariwisata halal merupakan konsep pariwisata yang mengintegrasikan tempat ibadah yang mudah diakses dan menyediakan layanan makanan halal. Selain itu, untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi warga, warga juga bisa memberikan oleh-oleh bertema religi/makanan halal. Konsep wisata halal yang diusung Pemerintah Kota Metropolitan Surabaya adalah pariwisata berbasis ekonomi yang bertujuan untuk mempercepat pemulihan perekonomian masyarakat setempat.

Strategi 5: Peningkatan pengembangan kualitas tata kelola pemerintah, reformasi birokrasi dan layanan publik.

Kompleksitas penerapan sistem pemerintahan saat ini menimbulkan permasalahan mendesak yang dapat menghambat pembangunan daerah. Terhambatnya pembangunan daerah secara langsung akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan prioritas yang telah ditetapkan di awal, dan daerah akan tertinggal dan kehilangan daya saing.

Oleh karena itu, pemerintah daerah harus terus berupaya mencegah hal ini dengan memperkenalkan penggunaan teknologi informasi melalui sistem pengelolaan digital. Teknologi ini merupakan alat penting untuk meningkatkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adanya sistem ini memudahkan pengelolaan dan pemantauan penyediaan berbagai informasi secara *real time*, sehingga mampu mendorong pembangunan daerah dengan lancar dan menciptakan daerah yang berdaya saing. Dari perspektif nasional, tata kelola teknologi membantu mengoordinasikan dan mengintegrasikan rencana nasional, menjaga referensi terhadap standar kualitas, dan memfasilitasi pemantauan dan evaluasi implementasi. Dari perspektif kelembagaan, manfaat yang terkait adalah menjaga pembatasan dan pedoman sesuai dengan praktik terbaik masing-masing sistem untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dari sudut pandang publik, manfaatnya termasuk memungkinkan masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari layanan yang lebih baik, mencapai transparansi administratif, dan menjalankan fungsi kontrol sosial. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Metropolitan Surabaya telah memutuskan strategi untuk mendorong pengembangan layanan yang sederhana dan cepat melalui sistem pengelolaan digital.

Strategi 6: Mewujudkan keharmonisan sosial, keamanan dan ketentraman wilayah serta pencegahan dan mitigasi bencana berbasis masyarakat.

Sistem pemerintahan yang terpadu ini diharapkan dapat lebih tanggap terhadap permasalahan masyarakat, khususnya melalui pemberian pelayanan berupa keamanan, perdamaian, dan keharmonisan. Rasa aman dalam hubungan dengan masyarakat lokal, pemberian pelayanan berupa perdamaian dan kerukunan merupakan hal mendasar yang harus diberikan negara kepada masyarakat lokal. Dalam rangka mendukung pembangunan daerah, penting untuk memberikan pelayanan yang memberikan keamanan, keselamatan, dan keharmonisan masyarakat lokal. Pemerintah daerah harus melayani masyarakatnya dengan cara yang aman, damai, dan harmonis. Ini semua tentang keramahan dalam perumahan dan kehidupan komunitas.

## **Pembangunan Syariah di Surabaya**

Salah satu pembangunan syariah yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya adalah sistem penyaluran zakat yang sebelumnya bersifat bantuan, menjadi berwujud modal untuk mendirikan usaha. Pemerintah Kota Surabaya, Kemenag Kota Surabaya, Baznas Surabaya, dan Laz se-Surabaya akan melakukan pendataan terhadap warga miskin. Dari data yang diperoleh tersebut, proses penyaluran zakat modal usaha akan lebih mudah. Bentuk modal usaha tersebut dapat berupa alat dagang, supaya penerima manfaat menjadi mandiri secara ekonomi.

Wali kota Surabaya, Eri Cahyadi mengatakan bahwa tujuan pemerintah adalah menjadikan penerima zakat atau mustahiq menjadi penyalur zakat atau Muzakki. Karena menurutnya, setiap zakat, infaq, dan sedekah dari Kemenag Surabaya, Baznas Surabaya, dan Laz se-Surabaya akan digabung menjadi satu. Melalui zakat pemberdayaan ini, diharapkan warga tersebut dapat memiliki tabungan dan dapat mandiri secara ekonomi dalam waktu lima bulan. Sedangkan selama jangka waktu 5 bulan tersebut tetap di berikan bantuan, karena ketika diberi pekerjaan mereka tidak langsung memperoleh penghasilan untuk makan. Eri Cahyadi mengaku bahwa zakat, infaq, serta sedekah yang disalurkan oleh masyarakat kepada lembaga penerima zakat akan menjadi bagian dalam pembangunan Kota Surabaya, yaitu dalam proses pengentasan kemiskinan dan pengangguran (Pemerintah kota surabaya, 2023).

Selanjutnya, bertepatan pada peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-729, Wali Kota Eri Cahyadi memerintahkan seluruh jajarannya untuk melakukan pemetaan terhadap kemampuan dan usia kerja pada 350 ribu KK yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Pada bulan Juni sampai Juli 2022, Baznas berfokus pada penyaluran zakat produktif yang akan dijadikan sebagai modal usaha. Baznas juga membantu Pemkot Surabaya dalam program pengentasan MBR, dengan memberikan zakat untuk MBR dengan konsep *Zakat Community Development*. Melalui konsep tersebut, dilakukan klasifikasi berdasarkan kemampuan dan usia kerja untuk mendapatkan modal usaha.

Setiap bulannya, Baznas rata-rata mampu menghimpun zakat sebanyak 2 Miliar. Jika dihitung secara kumulatif selama 7 bulan, Baznas telah menghimpun zakat sebanyak 14 Miliar. Selain itu, Baznas juga rutin menyalurkan bantuan pada program Surabaya Cerdas yaitu dengan memberikan beasiswa untuk 1.565 siswa SMP, serta menyalurkan bantuan beasiswa dan biaya hidup untuk 172 anak asuh dari eks lokalisasi (Pemerintah kota surabaya, 2022). Umer Chapra mengatakan bahwa zakat mempunyai nilai strategis yang efektif, dikarenakan tujuan zakat yang tidak hanya terbatas pada bantuan konsumsi saja, tetapi juga bertujuan jangka panjang untuk mengatasi masalah kemiskinan. Sahal Mahfuz juga menyatakan bahwa zakat tidak hanya mengenai ibadah saja, akan tetapi sebagai bentuk alat sosial yang dapat membantu mengatasi kemiskinan (Maulana et al., 2023). Dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pengelolaan zakat yang baik menjadi modal penting dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Surabaya.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi harus memperhatikan karakteristik daerah serta mayoritas pekerjaan masyarakat untuk menggerakkan mereka secara efektif. Pendekatan industrialisasi kapitalis yang dominan selama ini cenderung mengutamakan investasi modal tanpa memperhatikan kepentingan luas masyarakat, sehingga aktivitas ekonomi tidak selaras dengan potensi dan keterampilan masyarakat. Berbeda dengan pembangunan ekonomi berbasis syariah, pembangunan ini merupakan konsep yang menganalisis suatu proses pembangunan dan faktor-faktor

yang berpengaruh terhadap pembangunan tersebut, serta mengutamakan kebijakan pembangunan berdasarkan Al-Qur'an, Hadis Rasulullah SAW, Ijma', dan Qiyas. Konsep pembangunan ekonomi Barat cenderung hanya menyoroti aspek materi dan lingkungan fisik saja. Sementara, pusat dari pembangunan dalam Islam adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia itu sendiri, termasuk lingkungan fisik dan sosialnya. Ini berarti Islam menekankan bahwa manusia sendiri adalah fokus utama dari kegiatan pembangunan.

Pemerintah Kota Surabaya dalam merancang strategi-strategi pembangunan perekonomian keberlanjutan, telah sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan syariah. Hal ini dapat dilihat dari manusia yang merupakan fokus utama dalam kegiatan pembangunan serta adanya upaya penghijauan yang merupakan wujud pemeliharaan terhadap titipan Allah SWT kepada manusia. Salah satu contoh pembangunan syariah yang diterapkan oleh pemerintah kota Surabaya adalah sistem penyaluran zakat yang tidak lagi bersifat bantuan, akan tetapi berwujud modal usaha. Zakat produktif sangat berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Surabaya agar tidak ketergantungan terhadap bantuan sosial saja serta sebagai upaya memperbaiki sumber daya manusia yang masih kurang. Terlebih lagi zakat memiliki nilai strategis yang efektif karena tujuannya tidak hanya terbatas pada bantuan konsumsi bagi masyarakat miskin, tetapi juga bertujuan jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan adanya sistem zakat produktif diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di Surabaya khususnya masalah pengangguran dan kemiskinan.

## Daftar Pustaka

### a. Buku

- Beik, I. syauqi, & Arsyianty, L. D. (2017). *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Rajawali Pers.
- Masruroh, Nikmatul, E. a. (2022). Ekonomi Sirkular dan Pembangunan Berkelanjutan. In *Jejak Pustaka*.

### b. Jurnal

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Fuadi, N. F. Z. (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 151–177. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2711>
- Joni, T. B. (2008). Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berteraskan Islam. *Jurnal Usuluddin*, 27, 93–107. [http://apium.um.edu.my/journals/journal\\_usul/No\\_Usul.php](http://apium.um.edu.my/journals/journal_usul/No_Usul.php)
- Mansur, A. (2011). Peran Bank Syariah Di Dalam Pembangunan Ekonomi. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 1(1), 63–88. <https://doi.org/10.15642/elqist.2011.1.1.63-88>
- Maulana, A., Wahyuningdyah, E. T., & Novantori, H. (2023). PEMANFAATAN KEMBALI PENYALURAN DANA ZAKAT PRODUKTIF MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL UNTUK MENGATASI KEMISKINAN DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*,

8(4), 837–848.

Purwana, A. E. (2013). Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 10(1), 18. <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.140>

Rintan P. Ayu Aprilliani. (2018). Pengentasan Kemiskinan di Desa Talok Melalui Pendidikan Non - Formal Berbasis Anyaman Bambu dengan Metode Pembangunan Berkelanjutan Pasal 7 UU No. 13 Tahun 2011 Menuju Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia 2045. *Lex Scientia Law Review*, 2(1), 31–46.

RPJMD Kota Surabaya. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026*. Pemerintah Kota Surabaya. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://bappedalitbang.surabaya.go.id/images/File Upload/RPJMD 2021-2026.pdf>

Zakaria, A. M., & Rachmat, M. (2021). Membangun Perekonomian Desa Berkelanjutan Melalui Manajemen Kinerja Berbasis Community Empowerment. *petoesan-Hindia: Telaah Pemikiran Kebangsaan*, 3(1), 7–13. <https://doi.org/10.34199/oh.v3i1.65>

c. Rujukan dan Sumber Website :

Bappeda, J. (2019). *Rpjmd\_Jatim\_2019\_2024\_Official.Pdf*.

Jajang, A., Mahri, W., Cupian, |, Nur, M., Al Arif, R., Arundina, T., & Widiastuti, T. (2021). *A Jajang W etc*.

Jaya, A. (2004). KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development). *Tugas Individu Pengantar Falsafah Sains, Program S3 Institut Pertanian Bogor*, 1–11.

Pemerintah kota surabaya. (2022). *HIMPUN ZAKAT HINGGA 14 M, PEMKOT SURABAYA DAN BAZNAS FOKUS PENGEMBANGAN SDM*. Pemerintah Kota Surabaya. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/66713/himpun-zakat-hingga-14-m-pemko>

Pemerintah kota surabaya. (2023). *PENYALURAN ZAKAT DI SURABAYA TAK LAGI BERSIFAT BANTUAN, WALI KOTA ERI: WUJUDNYA MODAL USAHA*. Pemerintah Kota Surabaya. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/73457/penyaluran-zakat-di-surabaya-tak-lagi-bersifat-bantuan-wali-kota-eri-wujudnya-modal-usaha>